



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Implementation of Fixed Asset Accounting Treatment at the Regional Industry and Trade Office of Central Sulawesi Province

Murni Mahmud Lasene^{1*}, Olivia H. Munayang², Siti Zuhroh¹

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido

***Corresponding Author: E-mail: murnimahmudlasene@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 16 Dec, 2025

Revised: 18 Jan, 2026

Accepted: 24 Jan, 2026

Kata Kunci:

Penerapan Akuntansi Aset Tetap, PSAP No. 07, Permendagri No. 17 Tahun 2007

Keywords:

Fixed Asset Accounting, PSAP No. 07, Minister of Home Affairs Regulation No. 17 of 2007

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10332](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10332)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 serta kesesuaianya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset tetap merupakan komponen krusial dalam pengelolaan keuangan daerah yang menuntut pencatatan, pengukuran, penyusutan, dan penghapusan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas tersebut, mencakup aspek pengakuan, klasifikasi, pengukuran, penilaian, penyusutan, pelaporan, pengamanan, pemeliharaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset tetap, telah sesuai dengan ketentuan standar dan regulasi yang berlaku. Namun demikian, proses penghapusan aset masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan jumlah tim penaksir serta ketergantungan terhadap tim penaksir dari luar daerah.

ABSTRACT

This research seeks to examine how fixed asset accounting practices are implemented at the Regional Office of Industry and Trade in Central Sulawesi Province. The analysis is grounded in the Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 07 and evaluates its alignment with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 17 of 2007, which outlines the guidelines for managing regional assets. Fixed assets play a vital role in regional financial administration, necessitating accurate processes for recording, measuring, depreciating, and disposing of assets in line with established accounting principles. Using a qualitative research method, data were gathered through interviews, direct observations, and literature reviews. The results reveal that

the Office has applied fixed asset accounting treatments—such as recognition, classification, measurement, valuation, depreciation, financial reporting, asset security, maintenance, as well as oversight and control—consistently with the relevant standards and regulatory frameworks

PENDAHULUAN

Aset tetap merupakan komponen yang sangat vital dalam akuntansi, baik di sektor swasta maupun publik, karena memiliki peran penting dalam menunjang operasional dan mempertahankan stabilitas keuangan suatu entitas. Secara umum, aset tetap adalah kekayaan jangka panjang yang dimiliki oleh organisasi dan tidak ditujukan untuk dijual, melainkan untuk mendukung proses bisnis atau pelayanan publik dalam jangka waktu yang lama. Aset tetap meliputi berbagai bentuk fisik, seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, hingga peralatan kantor, yang kesemuanya memiliki nilai ekonomis dan membutuhkan pengelolaan yang cermat agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi organisasi.

Dalam akuntansi, pengelolaan aset tetap mencakup berbagai perlakuan yang sesuai dengan standar akuntansi, mulai dari pencatatan, pengakuan nilai, hingga penyusutan aset tersebut sepanjang masa manfaatnya. Pencatatan yang akurat tidak hanya penting untuk memastikan aset terdata dengan benar, tetapi juga diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan, sehingga organisasi dapat mengelola dan mempertanggung jawabkan nilai kekayaannya dengan baik. Selain itu, metode penyusutan yang tepat akan memastikan bahwa nilai ekonomis dari aset tersebut tercermin secara wajar dalam laporan keuangan, sehingga para pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran yang akurat tentang kondisi finansial dan aset organisasi.

Perlakuan akuntansi aset tetap ini memiliki kompleksitas tersendiri karena perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti masa manfaat aset, metode penyusutan yang paling sesuai, dan kebijakan penghapusan aset ketika sudah tidak lagi memberikan manfaat ekonomis. Bagi sektor publik, terutama di lingkungan pemerintahan, pengelolaan aset tetap bukan hanya soal menjaga nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Pemerintah dituntut untuk mengelola aset secara efisien dan memastikan bahwa setiap aset tetap yang diakuisisi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Di sini, peraturan dan pedoman teknis, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, berperan penting untuk mengatur dan mengarahkan pengelolaan aset agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah, aset tetap memiliki peran krusial dalam mendukung tugas utama dinas ini, yakni pengembangan sektor industri dan perdagangan di tingkat daerah. Dinas ini bertanggung jawab dalam memanfaatkan aset-aset seperti bangunan, kendaraan, peralatan industri, hingga fasilitas umum lainnya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing industri lokal. Namun, pengelolaan aset tetap di sektor publik, termasuk di dinas ini, tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut bisa berupa keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan, penurunan nilai aset karena tidak dikelola dengan baik, hingga permasalahan administratif seperti pencatatan aset yang kurang akurat.

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan aset di instansi pemerintah sering kali menghadapi masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sebagai contoh, aset tetap yang kurang terdata dengan baik dapat menimbulkan kerugian karena tidak termanfaatkan secara optimal. Selain itu, tanpa penerapan metode penyusutan yang sesuai, nilai aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat mengalami distorsi, yang pada akhirnya mengurangi keakuratan data untuk pengambilan keputusan strategis.

Pengelolaan aset tetap menjadi isu penting dalam organisasi, baik swasta maupun publik, karena aset tetap mendukung kelangsungan operasional dan berkontribusi besar pada stabilitas keuangan jangka panjang. Dalam akuntansi, pengelolaan aset tetap mencakup pencatatan, penyusutan, dan penghapusan aset. Proses ini memungkinkan organisasi untuk memantau, menjaga, dan

mempertahankan nilai ekonomis aset, sehingga memberikan manfaat optimal dalam mendukung aktivitas dan investasi jangka panjang. Pengelolaan aset yang baik juga memastikan bahwa setiap aset tercatat secara akurat, meminimalkan risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset yang dapat mengganggu operasi dan mengurangi nilai kekayaan organisasi.

Di sektor publik, pengelolaan aset tetap tidak hanya terkait dengan nilai ekonomi, tetapi juga dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola barang milik daerah secara terperinci, mulai dari pengadaan hingga penghapusan aset. Peraturan ini bertujuan agar pemerintah dapat memanfaatkan setiap aset untuk pelayanan publik, menjaga kelayakan aset, dan mencegah penggunaan anggaran yang tidak efisien. Mardiasmo (2009) menekankan pentingnya standar akuntansi pemerintah yang konsisten untuk memudahkan evaluasi dan pengelolaan aset tetap, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset.

Namun, fakta menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap di sektor pemerintahan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Hasanah dan Setiawati mengungkapkan bahwa aset pemerintah daerah kerap tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan ada yang menjadi beban karena biaya pemeliharaannya yang tinggi tanpa kontribusi yang berarti terhadap tujuan organisasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kurangnya optimalisasi pemanfaatan aset sering kali diakibatkan oleh kendala administratif, kurangnya anggaran pemeliharaan, atau prosedur pencatatan yang tidak akurat. Hal ini mengakibatkan nilai aset yang dilaporkan menjadi tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya di lapangan, sehingga berpotensi menyesatkan dalam perencanaan dan alokasi anggaran.

Pendapat Anthony dan Govindarajan juga memperkuat pentingnya pencatatan dan penyusutan aset tetap yang tepat, terutama dalam organisasi besar seperti pemerintah daerah. Menurut mereka, pencatatan aset yang akurat dan metode penyusutan yang benar dapat memberikan gambaran jelas mengenai nilai sebenarnya dari setiap aset dalam laporan keuangan. Hal ini tidak hanya membantu transparansi, tetapi juga memungkinkan instansi pemerintahan untuk membuat perencanaan keuangan yang lebih akurat dan efisien. Ghozali (2007) menambahkan bahwa tanpa metode penyusutan yang tepat, nilai aset dalam laporan keuangan akan terdistorsi, yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan terkait pengadaan atau penghapusan aset tetap.

Mengarah ke lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah, aset tetap seperti bangunan kantor, kendaraan dinas, dan peralatan industri berperan penting dalam mendukung misi dinas untuk mengembangkan sektor industri dan perdagangan di daerah. Namun, tantangan yang umum terjadi, seperti pencatatan yang kurang tepat dan keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan, juga dihadapi oleh dinas ini. Berdasarkan data empiris yang ada, pemanfaatan ruang, peralatan, dan kendaraan dinas sering kali tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan secara maksimal. Situasi ini tidak hanya menghambat efisiensi penggunaan aset tetapi juga menambah beban anggaran untuk pemeliharaan, yang seharusnya dapat dialokasikan lebih optimal.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi aset tetap yang konsisten dan tepat akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset pada instansi pemerintah. Dengan memperhatikan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan aset tetapnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan layanan publik. Selain itu, praktik pengelolaan aset yang baik juga akan meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, memberikan kepercayaan lebih besar kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran daerah yang lebih efektif dan efisien.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disperindag memiliki banyak aset tetap yang

mendukung pelaksanaan layanan publik, menunjang pencapaian kinerja, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang transparan. Namun terdapat aset tetap yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi dan aset yang hilang, tetapi masih tercatat dalam laporan neraca, dengan kategori pos aset lainnya, Meskipun aset tersebut telah dipindahkan ke kategori pos aset lainnya, pelaporan ini kurang mencerminkan kondisi aktual dari aset-aset dinas. Selain itu, terdapat keterlambatan dalam proses penghapusan aset karena harus menunggu keluarnya surat keputusan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Menurut Nurwanto, selaku Pengurus barang di Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan atau memaparkan secara sistematis dan faktual mengenai suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam konteks ini, peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi penerapan perlakuan akuntansi aset tetap di instansi tersebut.

Sumber data merupakan asal dari informasi yang diperoleh untuk menjadi dasar dari kesimpulan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu penulis memperoleh data secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara, data yang diperoleh penulis didapatkan secara langsung dari hasil wawancara antara penulis dengan Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Peneliti melakukan penelitian, menangkap fenomena atau meneliti yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data - data penelitian yang akurat. Lokasi Penelitian ini yaitu di dinas perindustrian dan perdagangan daerah provinsi sulawesi tengah yang beralamat di Jl. R.A. Kartini No.18, Lolu Sel.,Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111. Dilakukan sejak di keluarkan SK Penelitian dari Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu.

Waktu penelitian dimulai sejak bulan Juli sampai bulan September 2024 untuk target tahap proposal, dilanjutkan dengan tahap penelitian dan seminar skripsi dengan target direncanakan pada bulan maret 2025. Estimasi dari tahap awal sampai akhir adalah 9 bulan.

Analisis Data

Analisis data Miles dan Huberman adalah sebuah analisis pendekatan kualitatif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Mereka berdua adalah dua orang peneliti metodologi penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini dikenalkan dalam buku mereka berdua berjudul "Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook" tahun 1984, yang dimana telah direvisi sejak itu.

Analisis data Miles dan Huberman ini pastinya memiliki langkah- langkah yang unik yang membedakan dengan yang lain. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki, memahami, dan menginterpretasikan data kualitatif melalui serangkaian langkah sistematis. Berikut adalah beberapa langkah kunci dalam teknik analisis data Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah secara umum telah sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 Tahun 2010. Definisi, klasifikasi, dan pengakuan aset tetap telah dilaksanakan dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Hal ini didukung oleh teori dalam PSAP No. 07 (2010) yang

menyatakan bahwa aset tetap harus berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, serta digunakan untuk operasional pemerintah. Kieso (2011) juga menegaskan bahwa aset tetap bersifat jangka panjang dan harus dialokasikan penyusutannya secara sistematis agar beban periode lebih proporsional.

Pada praktiknya, klasifikasi aset di dinas ini sudah mengikuti kode inventarisasi, pengakuan aset didasarkan pada masa manfaatnya, sedangkan pengukuran aset tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehan. Penyusutan aset menggunakan metode saldo menurun, meskipun pelaksanaannya tidak konsisten setiap tahun sebagaimana dianjurkan dalam PSAP. Untuk penghentian dan pelepasan, mekanisme dilakukan melalui lelang terbuka, walaupun terkadang terhambat oleh keterbatasan tim penaksir.

Dengan demikian, hasil ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudjilah (2022) yang menemukan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap di Badan Kepegawaian Daerah DIY pada dasarnya sudah sesuai dengan PSAP No. 07, meskipun masih membutuhkan sistem yang lebih terintegrasi. Sejalan pula dengan penelitian Eka Ulfi Khanifiyah dkk. (2022) yang menyatakan bahwa implementasi pengakuan, penyusutan, serta penghentian aset tetap di Dinas PMPTSP Ponorogo telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007. Proses perencanaan kebutuhan dilakukan melalui pendataan detail, pengadaan aset melalui sistem E-katalog, serta penggunaan aset diatur dengan surat pengguna barang sebagai bentuk tanggung jawab pegawai. Hal ini didukung oleh teori Kusufi dan Halim (2007) yang menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan mencakup pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan aset daerah agar tercapai akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi.

Dalam pengamanan dan pemeliharaan, dinas melakukan sertifikasi, pemagaran, dan perawatan rutin sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Penilaian aset dilaksanakan oleh tim penaksir berwenang, sedangkan penghapusan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Namun, keterlambatan sering terjadi akibat keterbatasan tim penaksir yang berdampak pada lambatnya pelepasan aset dari neraca. Selain itu, mekanisme tuntutan ganti rugi ditegakkan melalui surat integritas yang mempertegas tanggung jawab pengguna aset.

Dengan demikian, hasil ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mudhi'ah Muhdsan dkk. (2024) yang menemukan bahwa penerapan akuntansi aset tetap di BPKAD Kabupaten Sinjai sebagian besar sudah sesuai standar, meskipun masih terdapat kekurangan pada pengakuan dan pengungkapan aset tertentu. Kondisi ini sama dengan yang ditemukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya pada keterlambatan penghapusan aset.

Efektifitas Penggunaan PSAP No. 07 Tahun 2010 Dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAP No. 07 Tahun 2010 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah cukup efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pelepasan aset tetap telah dilaksanakan sesuai standar, walaupun terdapat kelemahan pada konsistensi penyusutan tahunan dan keterlambatan penghapusan aset. Hal ini didukung oleh teori Mahmudi (2015) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi. Mardiasmo (2023) juga

menambahkan bahwa efektivitas identik dengan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan melalui penyelesaian masalah yang dihadapi.

Penerapan Permendagri No. 17 Tahun 2007 juga berjalan efektif, ditunjukkan dengan adanya perencanaan yang jelas, pengadaan berbasis sistem, pemeliharaan rutin, serta mekanisme ganti rugi yang ketat. Hambatan utama hanya terletak pada keterlambatan proses penghapusan akibat terbatasnya tim penaksir.

Dengan demikian, hasil ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Cahya R.S dkk. (2020) yang menemukan bahwa penerapan SAP 07 pada Dinas PUPR Situbondo masih menghadapi kendala karena belum sepenuhnya berbasis akrual. Perbedaannya, pada penelitian ini penerapan PSAP No. 07 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 sudah relatif lebih efektif, meskipun hambatan teknis masih ditemui pada penyusutan dan penghapusan aset.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PSAP No. 07 Tahun 2010 dan PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengakuan aset tetap dilakukan berdasarkan nilai minimal Rp300.000 dan umur manfaat lebih dari lima tahun, sementara klasifikasi aset disusun sesuai kategori seperti tanah, peralatan, bangunan, dan jalan.

Pencatatan aset tetap menggunakan metode biaya perolehan dengan akumulasi penyusutan melalui metode saldo menurun, garis lurus, dan unit produksi. Pelaporan aset dilakukan secara triwulan melalui aplikasi SIMDA ASET, yang mendukung transparansi dan akurasi data. Meskipun penghapusan aset masih menghadapi kendala akibat keterbatasan tim penaksir, proses pelelangan tetap dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur. Selain itu, pengamanan aset dilakukan dengan pembuatan sertifikat dan pemasangan pagar, sementara pemeliharaan aset dilaksanakan melalui anggaran khusus untuk perawatan rutin.

Efisiensi pengelolaan aset juga tercermin dari penggunaan sistem e-Katalog dalam pengadaan barang, yang meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi pemborosan anggaran. Secara keseluruhan, penerapan PSAP No. 07 Tahun 2010 dan PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah mencerminkan tata kelola aset tetap yang akuntabel, efisien, dan transparan.

Saran

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah disarankan membentuk atau melatih tim penaksir internal yang memiliki kompetensi dalam menilai aset tetap. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses penghapusan aset yang selama ini terhambat akibat ketergantungan pada tim penaksir dari luar daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan optimalisasi penggunaan aplikasi SIMDA ASET dengan memastikan seluruh data aset tetap tercatat secara akurat dan terkini. Selain itu, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap pencatatan aset rusak berat dan aset yang sudah dilelang agar tercatat secara otomatis dalam sistem.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebaiknya melakukan audit internal secara rutin terhadap pengelolaan aset tetap. Evaluasi ini penting untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi serta mengidentifikasi potensi permasalahan, seperti aset yang tidak tercatat atau rusak tetapi belum dilaporkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah perlu mengadakan pelatihan atau workshop secara berkala bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap ketentuan PSAP No. 07 Tahun 2010 dan PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengakuan, klasifikasi, dan pelaporan aset.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi, Sutanto. Mencegah Terulangnya Kembali Tubrukan Di Atas Kapal Kontainer Hanjin Ningbo. Diss. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2015.
- Amelia, P.S., Alghani, I.B., & Priyono, N. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3). 145-155.
- Anwar, Syaiful, and Mujito Mujito. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Motor Merek Yamaha Di Kota Bogor." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 9.1 (2021): 189-202.
- Apriani, D. (2016). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas).
- Asrulla, Asrulla, et al. "Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.3 (2023): 26320-26332.
- Azani, Nazwira, et al. "Analisa Perlakuan Aset Tetap Pada Pt. Hexindo Adiperkasa Tbk Cabang Pekanbaru Tahun 2021." *Research in Accounting Journal (RAJ)* 4.1 (2024): 53-60.
- Hasanah, Isnaini Uswatun. "Analisis Sistematika Penulisan Artikel Jurnal Kandai." (2019).
- Hastuti, Indriani Tri, and Mudiantono Mudiantono. Proses Pengadaan Sistem Kegiatan Penyimpanan Surat (Filing) Pada Bagian Sdm Dan Umum Kantorperum Perumnas Regional V Semarang. Diss. Sekolah Vokasi, 2017.
- Hayuning Anggrahita, Hayuning Anggrahita. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Di Desa Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Ukm Kripik Jagung Idola Di Desa Pandan Kecamatan Kemlagi Mojokerto Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Ukm Kripik Jagung. Diss. Universitas Islam Majapahit Mojokerto, 2019.
- Herdiyana, Deni, and Muhammad Luqman Rokhim. "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Kppbc Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 2.2 (2021): 53-70.
- Imron, Imron. "Analisa pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen menggunakan metode kuantitatif pada CV. Meubele Berkah Tangerang." *Indonesian journal on software engineering (IJSE)* 5.1 (2019): 19-28.
- Jannah, Aisyah Raudhatul, Lukman Hamid, and Rostika Srihilmawati. "Media pop up book untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak usia dini." *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 1.2 (2020): 1-17.
- Karo-Karo, Sastra, et al. "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Penyajiannya pada Laporan Keuangan PT Tanjung Migas (Spbu 14.203. 159) Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara." *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi* 1.4 (2023): 406-418.
- Lukman, H., & Sari, V. R. (2024). Pembelajaran Ayat Jurnal Penyesuaian Perusahaan Dagang Bagi Siswa Sma Kristoforus 1 Jakarta. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 806-813.
- Mararu, Gandi, Jullie J. Sondakh, and I. Gede Suwetja. "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Perusahaan Umum Badan Logistik Divisi Regional Provinsi Sulawesi Utara Dan Gorontalo." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 7.3 (2019).
- Marfuah, M. Si. Akuntansi Aktiva Tetap Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Nabilla, Amanda, and Almisar Hamid. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2.2 (2022): 103-111.
- Nazah, Khairatun. "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Atas Aset Tetap pada Politeknik Unggul LP3M Medan." (2015).

- Octavia, Apriani. "Studi Tentang Kelompok Belajar Usaha Amplang Pada Rumah Produksi Usaha Anda Jaya Samarinda." *Learning society: jurnal csr, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat* 1.1 (2020): 29-43.
- Pasaribu, F. (2017). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada PT Natama Karya Jaya Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Penyusun, Tim. "Pedoman Penyusunan Skripsi." Surakarta: UMS (2014). Permana, K. W. A., Kurniawan, Y., Trianto, A., & Handoko, D. T. (2022).
- Perlakuan Akuntansi Atas Asset Tetap Pada CV The 999 Project. *JURNAL EKOBIS Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 68-83.
- Putra, T. M. (2013). Analisis penerapan akuntansi aset tetap pada CV. Kombos Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Rizal, Ardi Usmaul, Lusiana Tulhusnah, and Ediyanto Ediyanto. "Pengaruh Beban Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Asn Dengan Lingkungan Kerja Sebagai Variabel Moderating Pada Dinas Kesehatan Situbondo." *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME)* 3.3 (2024): 490-502.
- Robingatin, Robingatin, et al. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Berdasarkan Pp No. 71 Tahun 2010 Di Puskesmas Tarik Sidoarjo. Diss. Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017.
- RS, Dwi Cahya, and Elok Fitriyah. "Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 Tentang Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo." *International Journal of Social Science and Business* 4.2 (2020): 284-293.
- Ruata, Deisy Seleste, Jantje J. Tinangon, and Lidia M. Mawikere. "Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 Pada PT Bank Maluku Malut Cabang Tobelo." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13.02 (2018).
- Sari, Dita Puspita, and Hendrawan Santosa Putra. "Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual." *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 11.2 (2012).
- Sri, Kurniawati. Analisis Kendala Yang Dihadapi Guru Dalam Pembelajaran Ips Dikelas Viii Seni 1 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak. Diss. Ikip Pgri Pontianak, 2023.
- Anisya, Vita, and Jumino Jumino. "Persepsi Pemustaka Terhadap Desain Interior Ruang Perpustakaan Di Perpustakaan Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 3.4 (2014): 131-140.
- Lotto, Linda S. "Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods: Matthew B. Miles and A. Michael Huberman." *Educational evaluation and policy analysis* 8.3 (1986): 329-331.